



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 95 TAHUN 2016**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dijelaskan Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang Komunikasi dan Informatika perlu dibentuk UPTD Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
10. Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat BLP, adalah bagian dari Sekretariat Daerah Kota Depok.
11. Pengadaan Barang/jasa secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti Ketentuan Peraturan presiden tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan di laksanakan dengan menggunakan teknologi Informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

12. Sistem pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya di singkat SPSE, adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan data base *E-Procurement* yang di kembangkan oleh LKPP untuk di gunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
13. Unit pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya di sebut UPTD adalah Unit pelaksana Teknis Dinas Layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
14. Pengelolaan LPSE adalah kegiatan yang meliputi penyelenggaraan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasnya kepada portal pengadaan Nasional.
15. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan barang/jasa Pemerintah secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
17. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran Tugas Pokok UPTD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik di bidang penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE).
- (2) UPTD Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Unsur Organisasi UPTD terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IVa.
- (2) Kasubag TU UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV b.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dibidang penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD dibidang pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik mengacu kepada rencana strategis Dinas;
 - b. pelaksanaan SPSE dan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
 - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD dalam Pengelolaan urusan Administrasi umum, kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.

- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan bahan Penyusunan Rencana Kerja dan rencana Kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib Administrasi dan tertib kerja diseluruh Satuan Organisasi dilingkungan UPTD;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPTD dan seluruh satuan organisasi dilingkungan UPTD;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana Anggaran UPTD dibawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - f. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
 - g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
 - h. penghimpunan dan inventarisasi Peraturan-peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
 - i. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD sebagai Pelaksana urusan Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan Fungsional umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian dilingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

H. HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 95

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK


N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

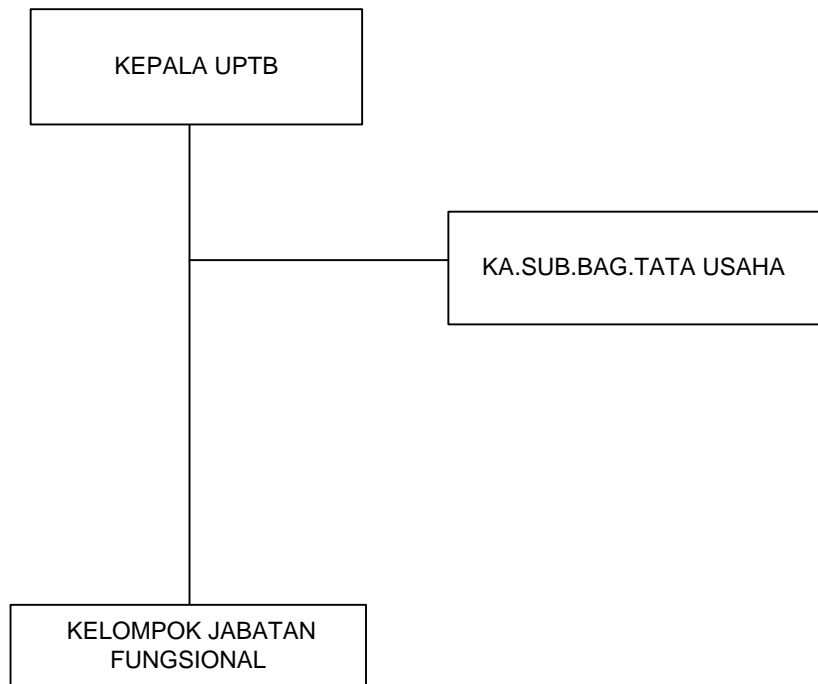
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 95

TAHUN : 2016

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS